

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/2712/XI/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 4 November 2020

Kepada
Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
di
Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Khurin Nabillah NIM: 120190302011, Nomor HP: 081269495170, email: knabillah@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Aktualisasi Modal Sosial Masyarakat Jakarta dalam Penanganan Pencemaran Plastik Ditinjau dari Perspektif Keamanan Lingkungan Maritim (Studi Kasus: Pencemaran Sampah Plastik di Teluk Jakarta)". Metode penelitian akan dilakukan secara kualitatif.
3. Berknsan dengan hal tersebut, mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Wasek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan.



Dr. Anindyo Mardiana, S.IP., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Menko Marvest RI
2. Menteri KLHK
3. Sekjen Kemhan RI
4. Rektor Unhan
5. Kepala DLHK Prov. DKI JKT
6. Kasatwas Unhan
7. Dekan FKN Unhan
8. Karo AK Unhan.

DAFTAR PEJABAT TUJUAN SURAT

1. Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan - Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik
2. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI
5. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta


a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Wanek Y Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Dr. Siti Mahiza, S.IP., M.A., M.Sc., CIQR., CIQaR
Mayor Jenderal TNI

LAMPIRAN 2 SURAT KETERANGAN PENELITIAN

L.2.1 Surat Keterangan Penelitian: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SURAT IZIN PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA
Nomor : 20021 /- 1.871. 84

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
- c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Pengumuman Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian/Surat Keterangan Penelitian;
- e. Surat Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor B/2712/90/2020 Tanggal 4 November 2020 Perihal Permohonan Mengadakan Riset.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : Khurin Nabilah
NIM : 120190302011
Program Studi : Keamanaan Maritim
Nama Perguruan Tinggi : Kementerian Perairan RI Universitas Pertahanan
Untuk : Melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan penyusunan tugas akhir dengan judul "Aktualisasi Modal Sosial Masyarakat Jakarta dalam Peringatan Pencemaran Plastik Ditinjau dari Perspektif Keamanaan Lingkungan Maritim (Studi Kasus : Pencemaran Sampah Plastik di Teluk Jakarta)".


Dengan ketentuan yang harus dibuat sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
2. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
3. Surat Izin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan tersebut kepada yang bersangkutan agar menghubungi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 2020


Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta,
Drs. Syamsudin, M.Si
NIP.197301011992051004

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Kementerian Perairan RI Universitas Pertahanan

3/13

FORM KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Berdasarkan kegiatan Penelitian Tesis yang berjudul "Aktualisasi Modal Sosial Masyarakat Jakarta dalam Penanganan Penanganan Plastik Ditinjau dari aspekof Keamanan Lingkungan Maritim (Studi Kasus: Pecemaran Sampah Plastik di Teluk Jakarta)", yang akan dilaksanakan di Instansi/Organisasi/Kelompokan tempat Narasumber bersedia, dengan ini Narasumber menyatakan bahwa:

1. Narasumber telah diberi lembar informasi (Information letter), yang menjelaskan tentang kegiatan penelitian ini.
2. Narasumber telah diberi membaca dan memahami informasi dalam lembar informasi (Information letter) tersebut.
3. Narasumber telah diberi kesempatan untuk bertanya dan telah diberi jawaban yang memuaskan Narasumber.
4. Narasumber menyadari bahwa jika peneliti mempunyai pertanyaan tambahan, Narasumber dapat menghubungi peneliti atau pembimbingnya melalui nomor telepon atau email yang telah disediakan.
5. Narasumber memahami bahwa ketersediaan peneliti dalam kegiatan penelitian ini akan mencakup kegiatan wawancara dan direkam, sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data.
6. Narasumber memahami bahwa informasi yang peneliti berikan akan dijaga kerahasiannya.
7. Narasumber menyadari bahwa informasi yang Narasumber berikan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ini, dan memahami bagaimana informasi tersebut akan digunakan.
8. Narasumber memahami bahwa Narasumber bebas untuk menarik diri dari ketersediaan dalam penelitian ini kapan pun juga, tanpa penjelasan atau denda apa pun.
9. Narasumber setuju untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini.

Narasumber menyatakan kesediaannya sebagai partisipan dalam kegiatan penelitian ini.

Tanggal : 14 Januari 2021

Nama Narasumber : K. H. Djoko Rianto Budi Hartono, M.Si

Jabatan : Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Tanda Tangan :
Narasumber



L.2.2 Surat Keterangan Penelitian: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

FORM KESEDIAAN MENJADI INFORMAN

Berdasarkan kegiatan Penelitian Tesis yang berjudul "Aktualisasi Modal Sosial Masyarakat Jakarta dalam Penanganan Penemuan Plastik Ditinjau dari Perspektif Keamanan Lingkungan Maritim (Studi Kasus: Pecemaran Sampah Plastik di Teluk Jakarta)", yang akan dilaksanakan di Instansi/Organisasi/Kelembagaan tempat informan bernaung, dengan ini informan menyatakan bahwa:

1. Informan telah diberi lembar informasi (*the information letter*), yang menjelaskan tentang kegiatan penelitian ini,
2. Informan telah diberi membaca dan memahami informasi dalam lembar informasi (*the information letter*) tersebut,
3. Informan telah diberi kesempatan untuk bertanya dan telah diberi jawaban yang memuaskan informan,
4. Informan menyadari bahwa jika peneliti mempunyai pertanyaan tambahan, informan dapat menghubungi peneliti atau pembimbingnya melalui nomor telepon atau email yang telah disediakan,
5. Informan memahami bahwa keikutsertaan peneliti dalam kegiatan penelitian ini akan mencakup kegiatan wawancara dan direkam, sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data,
6. Informan memahami bahwa informasi yang peneliti berikan akan dijaga kerahasiannya,
7. Informan menyadari bahwa informasi yang informan berikan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ini, dan memahami bagaimana informasi tersebut akan digunakan,
8. Informan memahami bahwa informan bebas untuk menarik diri dari keikutsertaan dalam penelitian ini kapan pun juga, tanpa penjelasan atau denda apa pun,
9. Informan setuju untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini.

Informan menyatakan kesediaannya sebagai partisipan dalam kegiatan penelitian ini.

Tanggal : 1 Desember 2020

Nama Informan : Ir. Dida Miftar Ridha M.Si

Jabatan : Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

Tanda Tangan : 

L.2.3 Surat Keterangan Penelitian: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

FORM KESEDIAAN MENJADI INFORMAN

Berdasarkan kegiatan Penelitian Tesis yang berjudul "Aktualisasi Modal Sosial Masyarakat Jakarta dalam Penanganan Penemuan Plastik Ditinjau dari Perspektif Keamanan Lingkungan Maritim (Studi Kasus: Pecemaran Sampah Plastik di Teluk Jakarta)", yang akan dilaksanakan di Instansi/Organisasi/Kelembagaan tempat peneliti bernaung, dengan ini informan menyatakan bahwa:

1. Informan telah diberi lembar informasi (*the information letter*), yang menjelaskan tentang kegiatan penelitian ini,
2. Informan telah diberi membaca dan memahami informasi dalam lembar informasi (*the information letter*) tersebut,
3. Informan telah diberi kesempatan untuk bertanya dan telah diberi jawaban yang memuaskan informan,
4. Informan menyadari bahwa jika peneliti mempunyai pertanyaan tambahan, informan dapat menghubungi peneliti atau pembimbingnya melalui nomor telepon atau email yang telah disediakan,
5. Informan memahami bahwa keikutsertaan peneliti dalam kegiatan penelitian ini akan mencakup kegiatan wawancara dan direkam, sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data,
6. Informan memahami bahwa informasi yang peneliti berikan akan dijaga kerahasiannya,
7. Informan menyadari bahwa informasi yang informan berikan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ini, dan memahami bagaimana informasi tersebut akan digunakan,
8. Informan memahami bahwa informan bebas untuk menarik diri dari keikutsertaan dalam penelitian ini kapan pun juga, tanpa penjelasan atau denda apa pun,
9. Informan setuju untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ini.

Informan menyatakan kesediaannya sebagai partisipan dalam kegiatan penelitian ini.

Tanggal : 24 November 2020

Nama Informan : Rofi Alhanif

Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Tanda Tangan :
Informan



LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

<p>Aktualisasi modal sosial masyarakat Jakarta untuk penanganan sampah plastik di Teluk Jakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja akibat-akibat yang dapat ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pencemaran sampah plastik di teluk Jakarta? 2. Bagaimana upaya dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam penanganan isu pencemaran sampah plastik di teluk Jakarta? 3. Adakah badan khusus di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk penanganan isu pencemaran sampah plastik di teluk Jakarta? 4. Adakah program untuk penanganan pencemaran sampah plastik di Teluk Jakarta oleh Dinas Lingkungan Hidup Bapak? 5. Jika ada, sudah sejauh mana perkembangan program dalam isu pencemaran sampah plastik di teluk Jakarta? 6. Apakah di Dinas Lingkungan Hidup Bapak menemukan kendala dalam penanganan isu sampah plastik di teluk Jakarta? 7. Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penanganan pencemaran sampah plastik di teluk Jakarta?
<p>Praktik Pemberdayaan modal sosial masyarakat Jakarta dalam mendukung keamanan lingkungan maritim</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah target penurunan sampah plastik hingga 70% yang diinisiasi oleh Indonesia dapat menjadi solusi bagi penanganan pencemaran sampah plastik di teluk Jakarta? 2. Bagaimana aktualisasi rencana aksi nasional penanganan sampah laut tahun 2018-2025 yang diterbitkan oleh kemenkomarves? 3. Kendala apa saja yang muncul dari upaya pelaksanaan rencana aksi nasional tersebut? 4. Bagaimana harapan bapak ke depannya agar rencana aksi nasional dapat berjalan dengan optimal? 5. Apakah menurut Bapak, masyarakat Jakarta merupakan masyarakat yang sudah peduli akan lingkungan? 6. Bagaimana menurut Bapak partisipasi masyarakat Jakarta sejauh ini dalam penanganan isu pencemaran sampah plastik di teluk Jakarta? 7. Apakah menurut Bapak partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu strategi penanganan sampah plastik di teluk Jakarta? 8. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat Jakarta untuk penanganan sampah plastik? 9. Bagaimana harapan Bapak pada partisipasi masyarakat terhadap penanganan isu pencemaran sampah plastik di teluk Jakarta? 10. Apakah menurut Bapak teknologi di bidang komunikasi berperan dalam partisipasi masyarakat Jakarta dalam penanganan sampah plastik di Teluk Jakarta? 11. Apakah menurut Bapak rasa percaya masyarakat terhadap institusi berpengaruh terhadap penanganan sampah plastik di teluk Jakarta?

LAMPIRAN 4

TRANSKRIP WAWANCARA

L.4.1 Transkrip Wawancara: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Informasi Kegiatan Penelitian

Hari, tanggal : Kamis, 14 Januari 2021
Waktu : 09:00 – 10:00 WIB
Tempat : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Identitas Informan

Nama : Ir. H. Djoko Rianto Budi Hartono, M.Si
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Hasil Wawancara

Pertanyaan Penelitian 1

Bagaimana aktualisasi modal sosial yang dapat digunakan untuk penanganan sampah plastik di Teluk Jakarta dalam perspektif keamanan lingkungan maritim?

Core Question:

1. Kendala dalam penanganan sampah plastik
2. Program penanganan pencemaran sampah plastik di Teluk Jakarta
3. Kepedulian masyarakat DKI Jakarta terhadap penanganan sampah plastic
4. Peran teknologi media sosial dalam perubahan perilaku masyarakat

Apa akibat yang ditimbulkan dari pencemaran sampah plastik di Teluk Jakarta?

Banyak. Yang pertama, pencemaran berdampak pada pertumbuhan atau habitat iklim mikro di laut. Kemudian, dampaknya berpengaruh terhadap populasi mikroorganisme, populasi plankton, populasi ikan termasuk, itu menjadi semacam rantai makanan. Kemudian dampak yang lain, mikroplastik itu kalau nanti dikonsumsi oleh ikan, kemudian ikan dikonsumsi dalam proses metabolisme tubuh kita akan berdampak terhadap penyimpangan pertumbuhan jaringan, termasuk kanker dan jenis penyakit lain. Dampak yang paling besar akan berpengaruh terhadap kehidupan laut secara umum. Pencemaran akan berdampak pada pertumbuhan fitoplankton, plankton, kemudian hewan-hewan laut yang lain. Sementara hewan laut termasuk ikan dan lainnya menjadi sumber pendapatan masyarakat nelayan khususnya, nelayan tangkap atau nelayan budidaya akan berdampak pada itu dan akhirnya akan berdampak pada hasil. Akibatnya lumayan signifikan, bahkan memberikan efek domino yang sangat besar bagi tatanan kehidupan termasuk ketahanan pangan. Misalnya pencemaran Teluk Jakarta. Terhadap kerang kerang di Teluk Jakarta, hampir sebagian terkontaminasi oleh logam berat kemudian termasuk mikroplastik juga dampaknya kerang kita konsumsi

karena kita konsumsi ada logam berat yang masuk ke tubuh kita termasuk mikroplastik misalnya itu akan berdampak pada penyimpangan jaringan tubuh kita apalagi kalo misalnya logam berat seperti pada tragedi Minamata, logam berat dari air raksa dampaknya berkepanjangan tidak hanya pada saat itu saja. Ada bayi cacat lahir, kemudian terjadinya mutasi dan sebagainya. Dampaknya luas kalau untuk plastik karena plastik itu salah satu jenis senyawa organik polivalen yang sulit untuk terurai dan memerlukan waktu minimal sepuluh tahun untuk bisa terurai tergantung dari jenis plastiknya.

Apakah ada program di Teluk Jakarta yang secara khusus mengurus penanganan pencemaran sampah plastik?

Kalau programnya secara khusus di Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Suku Dinas saja, karena secara kewilayahan lautnya di DKI Jakarta tidak terlalu luas dalam hal sampah, lalu ada bagi tugas di atas Zona Ekonomi Eksklusif, seharusnya bukan tanggung jawab Pemerintah Daerah, seharusnya nasional, sementara kalau untuk sampah-sampah pesisir Teluk Jakarta itu lingkupnya dari beberapa wilayah. Apalagi kalau misalnya ada angin barat, itu berarti sampah yang berasal dari Lampung, Tangerang, bergeser ke sini, ke Teluk Jakarta. Tapi kalau sedang ada angin timur, sampah-sampah dari Bekasi, dari Karawang, dari wilayah Jawa lainnya akan bisa ke sini, itu seharusnya penanganannya tidak hanya parsial daerah tapi sudah menjadi tanggung jawab secara nasional, karena kalau sudah lintas batas tidak mungkin, misalnya ikan, sampah tidak bisa berkata itu dari mana, ikan juga sama. Kalau untuk program, kita di Sudin Kabupaten Seribu ada upaya untuk menangani sampah laut. Hanya saja, kalau penanganan sampah laut kita hanya terbatas dari bibir pantai itu hanya sekitar 50 meter, karena kalau lebih dari itu kita tidak mampu lagi. Seharusnya kalau sudah di atas 50 kita bisa ada semacam kapal yang secara otomatis melakukan pembersihan sampah yang ada di laut, seperti halnya truk *sweeper* yang menyapu jalan, jadi bolak balik jalan utama itu, dalam jangka waktu singkat sudah bisa membersihkan jalan-jalan protokol. Nah, di laut pun seharusnya begitu, ada semacam kapal yang digunakan untuk membersihkan laut mulai dari bibir pantai sampai dengan beberapa meter dari bibir pantai. Termasuk Zona Ekonomi Eksklusif, seharusnya Pemerintah Pusat paling tidak untuk campur tangan dalam hal penanganan sampah plastik khususnya untuk bisa dibersihkan, tapi untuk di kita yang kita kerjakan ada penanganan sampah plastik karena kita ada secara khusus kapal-kapal yang membersihkan sampah di bibir pantai, kemudian ada, kita pernah melakukan pengambilan sampah bawah laut, lalu kita juga kerjasama dengan DCA (*Diving Clean Action*), kita kerjasama dengan semacam lembaga swadaya masyarakat atau NGO contohnya dengan DCA itu tadi dalam hal penanganan sampah-sampah bawah laut termasuk sampah plastik. Lalu kerjasama dengan beberapa perusahaan penghasil sampah kemasan, hanya saja mereka sifatnya semacam bimbingan teknis, seharusnya ke depannya perusahaan-perusahaan itu punya kewajiban untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya, karena bagaimanapun mereka menghasilkan sampah plastik

termasuk sampah kemasan. Sampah kemasan cukup banyak. Di perusahaan-perusahaan yang memproduksi kemasan plastik itu sudah ada aturan-aturan tentang tanggung jawab perusahaan untuk dapat mengambil kembali sampah-sampah kemasan yang mereka hasilkan. Mereka punya kewajiban untuk mengambil kembali sampah-sampah terkait dengan tujuan program EPR mereka, di samping juga ada tanggung jawab sosial melalui program CSR mereka seharusnya

Perkembangan program pendirian Bank Sampah sudah sejauh mana?

Selama ini kan, ya itu tadi, target sesuai dengan Instruksi Gubernur 157 tahun 2016 bahwa setiap RW yang ada di DKI Jakarta mempunyai kewajiban untuk terbentuk satu Bank Sampah. Secara signifikan saat ini hampir 80% RW yang ada di DKI Jakarta sudah terbentuk Bank Sampah. Memang, perkembangannya memang sangat fluktuatif. Kalau beberapa pengurus Bank Sampahnya kreatif, untuk bisa memasarkan produk hasil pilahnya, kemudian punya kreatifitas untuk membuat produk daur ulang itu biasanya perkembangannya bisa lebih pesat.

Bagaimana kendala-kendala dalam isu penanganan sampah plastik?

Kalau di Kepulauan Seribu sendiri dari 24 RW semua sudah terbentuk Bank Sampah, bahkan ada beberapa RW yang lebih dari satu Bank Sampah. Di darat juga demikian. Tapi memang di daerah-daerah yang padat penduduknya memang ada RW yang belum terbentuk Bank Sampah, untuk wilayah darat.

Fluktuasi harga dari sampah plastik itu, salah satunya?

Ya, kalau sampah plastik yang punya nilai ekonomi kan? Ada beberapa sampah plastik yang saat ini belum bisa ditangani oleh masyarakat. Penanganan sampah saat ini sifatnya masih manual ya, belum, secara teknologi belum dipakai, padahal sebetulnya ada penanganan sampah plastik melalui pirolisis kan, jadi, sampah plastik yang disuling, atau dengan proses distilasi bisa menjadi minyak bahan bakar, hanya saja untuk kapasitas besar secara ekonomi belum begitu menguntungkan, jadi kalau untuk skala rumah tangga masih bisa menguntungkan.

Berarti mungkin teknologinya belum ada yang bisa skala kecil ya?

Teknologi skala kecil sebetulnya sudah ada, hanya saja ditinjau dari nilai ekonomi, prospek ekonominya dianggap belum begitu menguntungkan, karena plastik sekian ton jadinya hanya sekian minyak, sementara dia melalui proses distilasi, penyulingan, hanya sekian liter minyak. Sehingga kalau dijual, biaya produksi dengan itu, belum begitu menguntungkan

Berarti masalahnya itu masih ada kendala di cost-benefit?

Betul. Karena bagaimanapun memang seharusnya dalam hal penanganan sampah harus ada semacam subsidi Pemerintah kalau itu dilakukan oleh Perusahaan. Sama, sebetulnya kalo Bank Sampah juga harus ada campur tangan Pemerintah. Terutama dalam hal meningkatkan margin dari pengelolaan sampah itu. Karena kadang terjadi fluktuasi harga yang sangat tinggi, kalau kebetulan, waktu itu sedang ada impor sampah. Saat itu harga sempat turun drastis.

Berarti, itu kendala dari luar juga?

Ya, oleh karena itu perlu campur tangan Pemerintah, semacam Subsidi Pemerintah dalam hal penanganan sampah. Karena truk sampah ini dampaknya luar biasa sekali. Di DKI Jakarta saja untuk penanganan sampah relatif sangat besar biaya yang harus dikeluarkan, termasuk kompensasi ke warga masyarakat Bekasi di sekitar Bantar Gebang, memberikan insentif di setiap KK di sekitar TPA Bantar Gebang, karena dampak yang ditimbulkannya. Belum resiko adanya kebakaran, resiko adanya longsor, kelongsoran sampah yang terjadi, dan itu tidak bisa menjadi wewenang Pemerintah Daerah saja yang melakukan pengelolaan sampah. Harus ada stimulasi untuk mencerdaskan masyarakat supaya masyarakat mau menangani sampah secara mandiri.

Berarti kalau di lingkungan DKI Jakarta sendiri, sebenarnya masyarakat sudah cukup besar partisipasinya?

Sebetulnya kalau kita lihat dari perkembangan Bank Sampah yang ada di DKI Jakarta peran aktif masyarakat sudah cukup bagus. Karena indikatornya Bank Sampah itu makin banyak berarti ada beberapa warga masyarakat yang sudah memilah sampah. Bank sampah itu makin berkembang, berarti semakin besar juga partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan. Kemudian, memang dalam perkembangannya ada naik turunnya partisipasi masyarakat itu. Secara kluster ada yang masyarakat kelas menengah ke bawah itu kecenderungan untuk memilah, dia akan lebih besar, karena ada semacam kompensasi, tapi kalo yang menengah ke atas untuk memilah itu partisipasinya lebih kecil, karena mereka merasa ada finansial untuk menyelesaikan masalah sampah di dia. Dengan cara membayar, memberikan kompensasi untuk bisa menyelesaikan masalah sampah dia.

Kalau kalangan menengah ke atas itu karena motivasi finansialnya rendah, jadi motivasinya kecil

Sebagian begitu

Terkait dengan itu, pertanyaan saya selanjutnya, kalau peran teknologi seperti media sosial, itu berpengaruh untuk merubah perilaku masyarakat? Misalkan isu sampah ini sedang ramai, kalau misalkan Pemerintah ada program mempopulerkan, misalkan memilah sampah, begitu, menurut Bapak kira-kira gimana? Dari kalangan masyarakat menengah ke atas ini bisa ngaruh nggak perilakunya?

Bisa. Malah justru peran dari media sosial itu sangat besar di tata kehidupan masyarakat kita. Termasuk dalam hal pelanggaran sampah misalnya, beberapa kasus yang kemarin sempat viral, ada warga masyarakat yang membuang sampah di sungai pada saat teman-teman UPK Badan Air membersihkan sungai tersebut, begitu didokumentasikan lalu diupload di media langsung viral, yang bersangkutan sendiri sampai minta maaf kemudian diproses, denda, dengan besaran, karena itu perorangan, sesuai dengan Perda 3 tahun 2013, dikenai denda 500 ribu. Terus ada sempat viral juga mobil box yang membuang sampah beberapa karung ke pinggir sungai Kalimalang kan, begitu sempat tertangkap oleh kamera dari beberapa warga kemudian diupload kan jadi viral, kemudian ditangani oleh kepolisian, dan seterusnya. Pengaruhnya sangat besar, artinya perilaku yang kurang pantas masyarakat terkait dalam hal sampah itu begitu melalui media sosial diviralkan juga akan sangat berpengaruh sekali. Dan memang pengaruhnya ada yang secara langsung, ada yang tidak. Termasuk sosialisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan melalui media sosial juga efektif dibandingkan jika kita melakukan sosialisasi *door to door* ke Supermarket, ke Indomaret, ke Alfamart dan seterusnya. Lebih murah juga, karena jangkauannya luas, tidak hanya wilayah DKI saja, bisa sampai ke wilayah-wilayah lain yang terjangkau dengan fasilitas-fasilitas media sosial. Di Jakarta pengaruh media sosial itu besar, karena 90% kan, 99% saya kira, warga DKI punya fasilitas medsos, iya, minimal dari hp mereka.

Pertanyaan Penelitian 2

Bagaimana regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta terkait dengan penanganan sampah plastik yang ada di Teluk Jakarta?

Core Question:

1. Upaya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam penanganan isu pencemaran sampah plastik
2. Badan Khusus di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk penanganan isu pencemaran sampah plastik

Bagaimana upaya dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam penanganan isu pencemaran sampah plastik?

Secara umum kebijakan Pemprov DKI dalam hal ini dikomandoi oleh Dinas Lingkungan Hidup kita dalam penanganan pengelolaan sampah itu ada Perda 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta direvisi menjadi Perda 4 Tahun 2019 terkait dengan Pengolahan Sampah kemudian dalam hal antisipasi terhadap penggunaan atau cemaran plastik di masyarakat tidak hanya di Teluk Jakarta ada Peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2020 tentang Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan ada juga dalam upaya untuk menangani sampah plastik ada Pergub Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengembangan Bank Sampah di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada juga Ingub 80 tahun 2017 tentang Pemilahan Sampah-Sampah Organik Anorganik B3 dan E-waste terus ada juga terkait dengan Kebijakan Penanganan dan

Pengurangan Sampah atau Pergub 108 tahun 2019 tentang Kebijakan Strategis Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Jenis Rumah Tangga itu sebenarnya implementasi dari Instruksi Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga. Selain itu kita juga ada Pergub 107 tentang Pengelolaan Sampah di Instansi Pemerintah DKI Jakarta. Di situ ada bagaimana Instansi Pemerintah DKI Jakarta diwajibkan untuk mengelola sampahnya melalui pemilahan atau penyediaan sampah tujuh pilar. Itu salah satu implementasi dari Ingub 107 tahun 2020, ada lagi Pergub 77 2020 kemarin tentang Pengelolaan Sampah di lingkup RW di mana di dalamnya ada terbentuk semacam lembaga pengelolaan sampah itu di tataran kebijakan dalam tataran implementasi dari kebijakan tadi ada juga ada khusus semacam unit pelaksana yang menangani sampah-sampah yang ada di sungai maupun yang ada di danau, dialah yang khusus menangani sampah-sampah yang ada di sungai dan di danau. Sementara di Teluk Jakarta itu kan ada sumber sampah itu berasal dari 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta, dengan adanya teman-teman dari Badan Air ini sedikit banyak sudah bisa melakukan penanganan dan pengurangan sampah, yang tadinya banyak yang terkonsentrasi di Teluk Jakarta itu sudah ditangani di tingkat hulunya, sehingga sebelum sampai ke Teluk Jakarta sudah bisa diantisipasi, nah itu berdampak juga pada sampah plastik yang ada di teluk Jakarta. Itu salah satu upaya Dinas. Kemudian untuk Suku Dinas, di Dinas Lingkungan Hidup ada lima Suku Dinas untuk tingkat wilayah kota, dan satu Suku Dinas untuk tingkat Kabupaten, di Kabupaten Kepulauan Seribu. Teluk Jakarta itu secara geografis masuk dalam wilayah kota administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Ya, itu Kamal Muara, masuk Jakarta Barat. Penanganan sampah pesisir menjadi tanggung jawab Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Tapi kalau untuk kewilayahan memang dalam hal pemberdayaan masyarakat tetap menjadi kewenangan wilayah kota. Kalau misalnya yang di posisi Kamal Muara, berarti Jakarta Barat. Kalau mulai dari Penjaringan, Marunda, Ancol, kemudian Pelabuhan, teman-teman Jakarta Utara. Jadi kalau untuk pesisirnya memang kita. Karena Jakarta Utara tidak punya armada kapal. Hanya saja kalau dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitarnya itu teman-teman dari Kota Administrasi Jakarta Utara. Terkait dengan pemberdayaan bagaimana masyarakat itu bisa memanfaatkan kembali sampah plastik yang punya nilai ekonomi untuk bisa dilakukan daur ulang. Diantaranya dengan adanya Bank Sampah yang ada di daerah pesisir pantai. Kebetulan kan kita juga ada Ingub 157 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengembangan Bank Sampah yang di DKI Jakarta. Di dalamnya ada salah satu klausul yang menyatakan bahwa setiap RW diwajibkan terbentuk satu Bank Sampah. Kalau di Pulau Seribu ada 24 RW berarti di 2021 ini harus sudah ada 24 Bank Sampah. Saat ini sudah terbentuk di masing-masing RW, kita kan ada 2.779 RW yang sudah membentuk Bank Sampah tiap RW baru di Pulau Seribu kalau yang lain baru sebagian saja.

Apa Badan khusus di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk penanganan isu pencemaran sampah plastik?

Iya. TPA nya DKI itu di TPA Bantar Gebang. Jadi secara umum saja, pengolahan sampah secara umum itu tadi, kalo dia di air, UPK Badan Air, kalau untuk penimbunan sampahnya itu UPST. Kalau secara khusus penanganan sampah plastik tidak ada. Tapi kalau Badan yang menangani khusus untuk sampah itu ada beberapa, misalnya seperti UPTK Badan Air, itu khusus yang menangani sampah-sampah yang ada di sungai dan ada di danau, kemudian ada UPST Bantar Gebang yang khusus menangani sampah-sampah residu atau sampah yang campur. Selama ini sampah-sampah yang ada di DKI keseluruhan ditimbun atau ditumpuk di UPST Bantar Gebang. Kemudian, kalau untuk di bidang, itu ada bidang yang khusus menangani sampah, Bidang Pengelolaan Kebersihan. Ada beberapa seksinya yang menangani itu, ada Seksi Penanganan Limbah B3, ada Seksi Penanganan Sampah, kalau di tingkat wilayah itu juga ada beberapa seksi yang melaksanakan penanganan sampah di lapangan makanya kalau di tingkat wilayah itu ada Seksi Peran Serta Masyarakat, Seksi Peran Serta Masyarakat ini yang bertanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat untuk bisa secara mandiri mengelola sampahnya. Sejak terbit adanya Pergub 77 tahun 2020 tentang Bank Sampah di lingkup RW tadi, tapi kalau secara khusus tidak ada. Secara khusus lembaga yang menangani sampah plastik tidak ada.

Pak Jokowi pernah menyatakan penurunan sampah turun hingga 70%, di Rencana Aksi Nasional juga, kalau menurut Bapak, cukup atau tidak, target atau solusi bagi penanganan sampah plastik di Teluk Jakarta?

Sedang dalam proses. Proses untuk kerjasama dengan Holcim. Untuk bisa menambang sampah-sampah yang tadinya tertimbun sudah sekian lama. Penanganan sampah dan pengurangan sampah itu, sesuai dengan Kebijakan Nasional, ya, Perpres 97 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional dalam hal Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga kan, memang ditargetkan tiap tahun ada, mulai dari 70%, penanganan, kemudian 19% pengurangan, dan seterusnya. Di dalam implementasi di tingkat daerah khususnya DKI Jakarta diterbitkan Pergub 108 tahun 2019 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga. Di situ ada target 2019 itu pengurangan sampah pengurangannya itu 20%, penanganannya itu 70%. Kemudian di 2020 kemarin pengurangannya 22%, kemudian penanganannya 75%. Dari hasil itu, saya kira dalam hal penanganan sampah secara umum kalau untuk sampah plastik, bisa jadi tetap ada relevansinya. Saya kira bisa. Target itu bisa tercapai. Khususnya untuk di DKI Jakarta bisa. Sebetulnya bisa kita lihat di kondisi riil di lapangan. Penanganan ya, misalnya di jalan-jalan protokol, sungai-sungai kita sudah bersih. Danau kita sudah bersih. Jalan-jalan protokol yang ada di DKI kan sudah tidak ada yang kotor lagi. Kadang-kadang, ada demo pun, demo hari ini, nanti malam sudah bersih. Kalau ke jalan-jalan protokol kita, kemudian lihat sungai kita itu sudah bersih. Itu untuk penanganan, tapi memang untuk pengurangan, kita masih itu, ya, masih bisa melampaui lah, target, kemarin saja, target yang 2020, targetnya 22%, kita tercapai 21,75%. Mendekati pencapaian target lah. Untuk pengurangan. Tapi kalau

contoh penanganannya relatif sudah bisa sih, tapi ya itu tadi, masih sebatas dalam penumpukan saja. Artinya, sampah dikirim ke Bantar Gebang sampai saat ini, untuk pengelolaan dengan menjadikan energi baru sebatas antara 50-100 ton per hari. Kapasitas listrik yang dihasilkan kurang lebih sekitar 700 kwh. Karena sifatnya masih *pilot project*. Nanti mungkin sekali tempo bisa ke Bantar Gebang juga. Terkait dengan pengolahan sampah. Nanti kan ada *mining landfill* ya, penanganan sampah untuk dijadikan sebagai bahan energi pabrik semen Holcim. Sampah digunakan semacam batubara muda, tumpukan sampah yang sudah lama sudah dalam bentuk, sudah sebagian terdekomposisi digunakan untuk bahan bakar itu.

L.4.2 Transkrip Wawancara: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Informasi Kegiatan Penelitian

Hari, tanggal : Selasa, 1 Desember 2020
Waktu : 08:30 – 09:30 WIB
Tempat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Identitas Informan

Nama : Ir. Dida Migfar Ridha, M.Si
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Instansi : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hasil Wawancara

Pertanyaan Penelitian 1

Bagaimana aktualisasi modal sosial yang dapat digunakan untuk penanganan sampah plastik di Teluk Jakarta dalam perspektif keamanan lingkungan maritim?

Core Questions:

1.

Apakah menurut Bapak masyarakat Jakarta merupakan masyarakat yang sudah peduli akan lingkungan?

Ya

Apakah kepedulian masyarakat Jakarta sudah tertransfer menjadi aksi dengan optimal?

Kalau di Jakarta kita lihat, bagaimana organisasi pemerintah itu sampai tingkat Kelurahan sudah berjalan, jadi bagaimana, karena ini akses-akses pemerintahan sampai ke kelurahan, desa, jadi di situ memang ada peran dari pemerintah, dan juga ada peran dari masyarakat. Tinggal masalah keberimbangannya, begitu. Jadi kalau saya lihat, posisi *government* lebih kuat, karena berbagai program sampai kepada pasukan orange di berbagai lokasi itu kan merupakan indikasi bahwa *government* sudah cukup intens

dalam pelayanannya, tapi di satu sisi memang masyarakat tidak bergantung kepada pemerintah, ada beberapa insentif yang dilakukan. Jadi bisa sinergi lah.

Berarti dari masyarakat sendiri sudah ada insentif untuk melakukan gerakan peduli sampah?

Iya, dari masyarakat pun ada, dan melakukannya pun ada bermacam-macam, ada juga sampah itu sekarang bukan hanya menjadi sampah, malah menjadi komoditas. Jadi, kepedulian itu bisa terjadi karena ia memiliki kesadaran, tapi kepedulian juga bisa ada karena ada keuntungan ekonomi di dalamnya

Kalau sampah sebagai komoditi yang menguntungkan itu sudah terorganisasi?

Masyarakat banyak yang termotivasi soal ini karena keuntungan ekonomi, pemerintah akan memperhatikan dua hal, apakah *market* ini berjalan atau tidak. Ketika *market* itu berjalan, sebenarnya masyarakat sudah bisa melakukan peraturan, intervensi itu juga dilakukan ketika ada kegagalan pasar. Namun ketika sudah bisa berjalan dengan baik, berarti itu sudah bisa *marketable*. Jadi dari sisi itu, peran Pemerintah menjadi lebih ringan.

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam penanganan sampah terutama sampah plastik di Jakarta?

Masyarakat sebenarnya mengikuti aturan, kalau *clear*, dia akan melaksanakan. Seperti arahan menggunakan belanja dengan tas sendiri. Masyarakat sudah mengikuti aturan itu. Dan ketika itu dijalankan, karena sudah berubah pola-pola perilaku seperti membawa kantong.

Kira-kira masalah seperti apa, karena masalah sampah di Jakarta, terutama sampah plastik, menjadi masalah, walaupun tingkat kesadarannya sudah cukup tinggi. Berarti masalahnya ada di mana yang belum terselesaikan? Dan harapannya harus ditingkatkan lebih lanjut?

Jadi kalau dari segi masyarakatnya sendiri, kan pemerintah bagaimana mengurangi sampah plastik itu menjadi penting. Masalahnya plastik-plastik yang *single product*. Kalau plastik ini sebenarnya selama tidak ada teknologi lain yang bisa menangani plastik, plastik sekarang masih di. Karena memang yang menjadi permasalahan dari plastik itu kalau dia bocor, artinya *untreated*, artinya masuk ke sungai, dari sungai akhirnya masuk ke laut. Itu kan *problem* yang sekarang muncul. Tapi kalau kita sekarang itu plastik itu bisa dikelola, jadi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mengatasi agar sampah ini bisa *manageable*. Artinya, semua itu kena *treatment*, kan kalau sampah itu kan tipe dari sampah rumah tangga itu kan ada yang suka dibakar, ada juga yang dibuang. Nah kalau sampah ini yang tadi bisa dikelola, *ditreatment*, juga tidak masalah. Sebenarnya negara-negara lain pun masalahnya yang menjadi persoalan adalah dari

sampah plastik juga adalah ketika *leakage*-nya tinggi. Kalau kebocorannya ke badan air tinggi. Kalau dia di-*treatment* seperti di negara lain, sebetulnya Jepang juga menggunakan *incinerator*. Kalau kita masih terlalu mahal ya. Jadi sebenarnya permasalahannya bagaimana kita sambil menunggu proses pengadaan teknologi lain sebenarnya teknologi banyak, teknologi ini menjadi alternatif juga dalam sisi ekonomisnya harus dipertimbangkan. Misal, plastik *biodegradable*, terurai tapi mahal, otomatis kalah bersaing. Kalau sampah plastik itu kalau di sisi lingkungan ya, plastik itu berbahaya jika masuk ke perairan. Lalu ia menjadi mikroplastik. Tapi plastik tidak menghasilkan gas rumah kaca seperti jenis sampah lainnya. Kalau gas rumah kaca itu malah dihasilkan dari sampah organik. Bagi kesehatan perairan, plastik berbahaya, namun bagi iklim, justru sampah organik memiliki bahaya tersendiri, karena kandungan metana yang tinggi. Metana 21 kali lipat lebih dari CO₂. Makanya di kita ada prinsip *empowerment integrity*. Jadi, tidak satu sisi, dampak A terhadap ini, bisa positif, tapi ke lainnya bisa negatif. Jadi, mengatasi *leakagenya*. Kebocorannya itu. Artinya mengatasi masalah manajemennya.

Berarti partisipasinya bisa dalam bentuk mengurangi plastik sekali pakai ya?

Kepedulian itu ada yang secara umum ya, tapi ada hal-hal yang penting masih harus di-*educated* juga. Tapi secara umum, Jakarta ada lah ya. Dia sering, daerah terdampak juga.

Jadi itu kan ada yang putus, kepedulian sudah ada, tapi aksinya masih kurang gitu secara spesifik, kalau dari masyarakatnya sendiri

Sebetulnya betul, jadi aksinya ini karena peran pemerintah kan cukup ya, jadi ada yang dilakukan oleh pemerintah, ada juga yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh misalkan, orang bayar sampah di rumah-rumah gitu kan ya, kan sebetulnya sudah punya kontribusi juga itu kan. Membayar sampah. Walaupun itu tidak dikelola semua oleh pemerintah kan, ada juga yang swadaya masyarakat, masyarakat berkemauan untuk membayar karena dengan sampah yang dia keluarkan.

Kalau peran teknologi dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat itu bagaimana?

Jadi kalo teknologi pasti ya, karena, satu, perluasan informasi. Contoh, bagaimana orang dengan informasi mengetahui bagaimana, dulu tidak pernah terbayang, bagaimana plastik menjadi sampah, terurai, lalu masuk ke rantai makanan, lalu masuk ke manusia, begitu. Dari pengetahuan-pengatahuan seperti itu, lalu disebarluaskan dengan teknologi membuat. Dan juga di Jakarta kan penyebaran teknologi menjadi lebih memungkinkan. Lalu teknologi lainnya untuk penyadaran ya. Teknologi untuk sosialisasi maksudnya ya?

Ya, maksudnya teknologi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti apa perannya?

Yang jelas perannya tinggi. Dalam penyadaran masyarakat. Kalau peran teknologi itu, kan orang sadar orang peduli, tapi orang masih punya *concern* karena susah dikelola. Lalu ketika ada teknologi yang membantu. Teknologi komposter, jadi semakin. Teknologi itu justru yang bisa menjembatani antara kesadaran, kepedulian, dengan aksi nyata karena orang, manfaat. Contoh, bagaimana kalau tidak ada teknologi *reduce reuse recycle*. Kalau tidak ada teknologi itu, sampah plastik tidak ada nilai ekonominya. Pada zaman dulu. Lalu dengan sekarang orang punya sampai ke tingkat lapak-lapak saja punya Pemecah sampah, sehingga yang tadinya sampah menjadi punya nilai ekonomi, nanti ditimbang, itu kan teknologi juga ya. Teknologi akhirnya menjadi alat bantu, mending dimanfaatkan. Jadi, di konteks itu kan menjadi sangat penting, di satu sisi, teknologi itu menjadi penyadar, alat sosialisasi ya, teknologi itu menjadi jembatan untuk melakukan aksi sehingga mendapatkan nilai ekonomis. Itu menjadi lebih efektif. Karena orang sadar peduli tapi nggak ada nilai manfaat ekonomi bagi dia, tapi kalo dengan teknologi, wah, bisa menjadi alat kerjanya nih.

Pertanyaan Penelitian 2

Bagaimana regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta terkait dengan penanganan sampah plastik yang ada di Teluk Jakarta?

Untuk dari Peraturan Pemerintah sendiri soal sampah plastik sendiri kan sudah ada rencana aksi nasional, aktualisasinya bagaimana?

Jadi, Indonesia ini termasuk, negara-negara lain belum punya regulasi, hanya memang yang menjadi persoalan itu adalah namanya sampah plastik itu sama seperti isu lingkungan yang *transboundary*. Tantangannya begitu, jadi kalau sekarang, contoh misalkan, kita pernah punya *case* sampah di teluk Jakarta, pihak DKI bilang, kami sudah, dari Ciliwung sudah punya *catcher* sehingga tidak ada yang lolos. Lalu, kok di Teluk Jakarta masih banyak sampah? Terus dibilang kan, sampah ini dari Banten tuh, dari Bekasi. Lalu setelah itu, memang kan dia akan terbawa arus, begitu kan. Lalu setelah itu Banten, nggak, kata siapa? Gitu kan ya. Justru tantangan sekarang adalah sebenarnya kan ada *transboundary*, seharusnya ada teknologi lain yang membantu. Teknologi yang bisa mendeteksi apakah *tracking*. Sebenarnya sampah di sini ini datangnya dari mana? Itu kalau kita bisa melakukan *tracking* pada, oh ini ternyata datangnya dari sini ya. Dengan citra satelit, dengan pemodelan arus, nah itu sains sains yang harus didukung. Jadi sama seperti isu sampah seperti *climate*. Isu *climate*, kalau sudah di atmosfer, kan nggak ada, CO itu dari Indonesia, itu dari Malaysia, nggak ada. Gitu kan ya. Sekalipun contoh kan kita punya alat untuk mengukur emisi, sekarang kita bisa membuktikan bahwa ada korelasi antara hutan, hutan itu punya CO2 sekian kalau tidak ditebang. Ditebang, maka CO2-nya *released*. Ada sampah organik masuk ke TPA, di situ ada penelitian-penelitian, oh ini sumbernya dari sini, dari sini. Kalo sekarang di sampah, kalau begitu sampai kondisi tidak ada lagi yang mengeles, begitu. Di Karimun Jawa, sampah di Taman Nasional kan, lalu itu dari mana? Tidak ada yang mengaku. Kecuali kalau contoh misalkan sampah itu, sekarang di pinggir sungai, kita ini sekarang coba

melakukan pemantauan sampah-sampah di muara sungai. Kita kombinasi. Jadi ada sampah yang kita cek di laut, ada yang di-*plotting*, ada juga sampah yang kita cek di muara sungai. Lalu nanti ke depan kita model ke arus, gitu kan, kita punya citra satelit, pemodelan, ini loh, misalkan, Jawa Barat, Bekasi, berdampak ke Teluk Jakarta sekian. Banten sekian. Jakarta sekian. Orang tidak bisa ngeles lagi. Itu, jadi di sampah itu, makanya sekarang, ada dua pendekatan, gitu. Karena, pernah dengar Jambeck? Jambeck menghitung sampah laut di Indonesia, di berbagai negara, gimana caranya? Dia itu ngitungnya begini. Berapa jumlah penduduk yang tinggal di daerah, misalkan, *coastal*. Jadi, yang punya *impact* ke *coastal*. Di satu negara, dihitung, sekian populasinya. Lalu sekian populasinya, berapa sampah yang dihasilkan per kapita. Satu orang menghasilkan sampah sekian. Lalu dari sampah itu, berapa yang *treatment*, berapa yang *untreatment*. Lalu dari yang *untreatment* itu, lalu dihitung akhirnya, berapa komposisi sampah berapa, lalu komposisi plastik itu sekian. Lalu dia hitung juga data, ketemulah angka. Itulah yang sekarang diranking Indonesia kedua setelah Cina. Padahal ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa sampah itu tidak secara langsung memasuki dari sungai ke laut. Karena dia itu ada di sungai itu endapan-endapan di sungai.

Tidak semuanya mengapung dan terbawa arus?

Ya, apalagi sungainya ini kan. Iya itu sekarang mulai penelitian-penelitian, itu semua, penelitian yang dilakukan. Suatu saat itu nanti akan ketemu, oh ternyata datanya sekian sekian. Itu sih menurut saya tantangan di sampah itu. Jadi, sampah itu sekarang, makanya yang dilakukan, kalau di tempat kami, tiap tahun kita melakukan, sekarang kita ada 20 titik lokasi untuk memantau padatan sampah ini.

20 titik di Jakarta?

Di Indonesia. di Jakarta kita ambil di Kepulauan Seribu. Jadi, pakai sistem transek, di beberapa tempat, jadi transek dihitung per meter persegi, lalu dihitung berapa kepadatan sampah per meter persegi kawasan yang diukur. Lalu kepadatan sampah itu, plastiknya berapa persen. Jadi, dari tahun ke tahun. Jadi sekian pada tahun sekian. Tapi, hanya karena sampah ada di situ, bukan berarti sampah itu berasal dari lokasi itu. Itu permasalahannya. Jadi, prosesnya rumit untuk membuktikan, siapa yang membuang sampah itu. Kalau kita ada bukti forensik lah ya. Ini akhirnya orang nggak ngeles lagi loh ya. Itu sebenarnya. Dari sisi untuk *compliant*-nya . tapi kalo dari sisi masyarakatnya, ya itu lah. Bagaimana dia ini meningkatkan agar sampah plastik itu tidak bocor ke perairan. Kan tentunya, berarti, pelayanan sampahnya ditingkatkan. Karena masyarakat ini sangat peduli gitu ya. Lalu tidak ada jalurnya. Sadar, sadar, gitu kan. Tapi, gimana ya? Gitu kan. Kalau punya halaman, mungkin masih bisa bikin komposter, gitu kan. Kalau sekarang, orang dengan jangkauan teknologi informasi, orang sadar, gitu kan, punya kepedulian.

Berarti masih belum nemu cara yang efektif untuk, masih mencari jalannya?

Dan di Jakarta ini kalo dibilang modal *capital* pemerintahnya masih cukup tinggi. Mungkin di tempat lain justru modal sosial masyarakatnya yang tinggi. Kalo di Jakarta ini modal investasi pemerintahnya yang tinggi. Karena mungkin kayak Ibukota kan memang investasi pemerintahnya yang tinggi. Walaupun di beberapa tempat modal sosial masyarakat masih tinggi. Kalau modal sosial dikelola dengan baik, bisa tersinergi dengan pemerintah.

L.4.3 Transkrip Wawancara: Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi

Informasi Kegiatan Penelitian

Hari, tanggal : Selasa, 24 November 2020
Waktu : 12:00 – 13:00 WIB
Tempat : Bogor, via Zoom

Identitas Informan

Nama : Rofi Alhanif
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah
Instansi : Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi

Hasil Wawancara

Pertanyaan Penelitian 1

Bagaimana aktualisasi modal sosial yang dapat digunakan untuk penanganan sampah plastik di Teluk Jakarta dalam perspektif keamanan lingkungan maritim?

Apakah menurut Bapak masyarakat Jakarta merupakan masyarakat yang sudah peduli akan lingkungan?

Pertanyaannya, apakah penduduk Jakarta sudah peduli lingkungan gitu ya? Ya, saya tidak punya, saya sebetulnya ada data, ada data dari BPS sebetulnya, nanti bisa saya *provide*, tentang kesadaran lingkungan. Itu memang sebagian besar, itu memang rata-rata nasional ya, hanya sekitar 78% penduduk Indonesia yang sadar lingkungan. Artinya, untuk Jakarta nanti saya coba carikan datanya. Tetapi, artinya gini. Sebagian besar mungkin sudah sadar lingkungan ya. Tetapi masih ada masyarakat yang masih belum menyadari, atau mereka tahu, tapi belum bisa mempraktekannya. Ini ada survey dari LIPI yang menarik, bahwa sebagian besar masyarakat itu sudah tahu, misalnya, sampah itu merusak lingkungan, gitu. Sebagian besar sudah tahu. Tetapi begitu ditanya apakah mereka sudah melakukan aksi pemilahan sampah atau pengurangan sampah, sebagian besar mereka tidak melakukan itu. Artinya, bisa disimpulkan bahwa sebagian besar mungkin sudah tahu. Tentang lingkungan atau tentang dampak sampah, tetapi sebagian besar belum melakukan aksi. Nah saya kira ini menarik nih, temuan ini mungkin bisa dieksplor lagi nanti dalam penelitiannya nanti.

Berarti menurut bapak, peran dari *public figure*, terutama milenial itu penting sekali ya?

Ya, saya kira sangat penting, karena mereka adalah, *somehow* menjadi teladan juga. Kan banyak juga sekarang milenial atau *public figure* yang pesan diet kantong plastik, atau aksi pilah sampah dari rumah masing-masing, dan itu sangat baik untuk diikuti. Apalagi kan sekarang instagram atau twitter gitu ya, sudah banyak sebetulnya yang inisiatif seperti itu, dan itu menjadi *tools* yang menurut saya sih cukup efektif juga untuk mendorong generasi muda lah

Berarti teknologi berpengaruh signifikan dalam meningkatkan partisipasi sosial dari masyarakat untuk membantu mendorong penanganan sampah ini?

Ya, ya, ya. Setuju saya. Jadi, itu juga yang nanti akan kami, strategi kami di pemerintah akan coba untuk terus menggunakan media tersebut. Beberapa hari lalu kami menyelenggarakan seminar, namanya "*Zero Waste Campaign*". Jadi, media sosial kita anggap sebagai *Zero Waste Campaign*, kampanye yang *zero cost*, tidak terlalu mahal. Karena kita kan biasanya dengan tag lain, 'Jakarta Bebas Sampah', misalnya, kalau itu viral, itu bisa menjadi kampanye yang sangat baik, begitu. Teknologi seperti media komunikasi media sosial, kita sudah sangat tergantung dengan media sosial, sehingga itu juga harus dijadikan media kita untuk dapat berkampanye tentang pengelolaan sampah ini.

Kalau di Jakarta sendiri, tingkat pendidikan berpengaruh. Kalau tidak salah, tingkat pendidikan di Jakarta cukup tinggi. Apakah itu berpengaruh terhadap tingkat partisipasi sosial dari masyarakat Jakarta sendiri?

Saya sih terus terang angkanya belum ya, tapi mungkin di tempat lain ada. Tapi secara tren kelihatannya ada gerakan tertentu yang saat ini cukup inovatif di kalangan milenial yang sudah ngulik-ngulik lah, dengan teknologi, jadi faktor pendidikan juga di situ berpengaruh. Memang biasanya kalo masyarakat yang pendidikannya masih rendah ekonominya juga biasanya, akses kebersihannya juga kurang.

Harapan dalam upaya penanganan sampah ini untuk partisipasi sosialnya bagaimana?

Jadi penanganan sampah ini memang sifatnya multidimensional ya, artinya bukan hanya di ujungnya saja, tetapi kita harus mulai dari awal, mulai dari hulunya, begitu. Masalanya apa sih. Itu tadi, perubahan *mindset*, gitu. Sebelum dia menghasilkan sampah itu, harusnya kita ni, masyarakat mulai berpikir, ini menjadi sampah atau tidak, kalau mau membeli barang, itu seharusnya menjadi satu pertimbangan. Kalau sekiranya menghasilkan sampah lebih banyak mungkin tidak kita pilih begitu. Nah itu saya kira satu hal yang harus kita perhatikan dari awal. Makanya ada istilah 5R, gitu ya dari, dulu kan 3R ya, kalo sekarang 5R. *Rethink* itu penting. Berpikir lagi, sebelum kita menghasilkan sampah gitu, satu. Yang kedua, kita juga di level yang secara di individu dan keluarga mungkin sudah bisa memilah sampah, mana sampah yang organik, non organik, yang masih bisa bernilai gitu, dipilah dari situ, kemudian ada proses *circular economy* lah kalo

mbak khurin mengenal *circular economy*, jadi harus didorong ke sana, *circular economy* tidak akan terbentuk sebetulnya kalo persepsi masyarakat belum baik tentang sampah, sehingga nilai ekonomi sampah ini tidak akan tergali dengan baik kalau penanganannya dari awal tidak bisa kita lakukan dengan baik. Jadi, harapan saya sih memang nanti kita ada kesepahaman dan kesadaran dari masing-masing supaya bisa mengurangi sampah secara pribadi, keluarga dari rumah gitu kemudian bisa melakukan pengumpulan, atau pemilahan sampah sehingga nanti mana yang nanti bisa digunakan lagi, atau mana yang dimanfaatkan untuk kompos dan seterusnya sebelum residunya nanti dibuang ke TPA misalnya. Jadi kayak begitulah yang bisa kita dorong ke depan.

Pertanyaan selanjutnya, itu tadi dari donasi atau retribusi ya bapak. Untuk partisipasi sosialnya. Selain dari retribusi, partisipasi sosial juga bisa dilakukan dengan menyumbangkan waktu sebagai relawan. Kalau di Jakarta sendiri, seperti apa ya bapak?

Saya kira kerelawanan ini di Jakarta cukup baik menurut saya sih dibandingkan dengan daerah lain, karena tadi, banyak inisiatif-inisiatif, terutama oleh milenial gitu, yang ikut aksi-aksi. Misalnya kalau kita buat aksi bersih, di Jakarta, di lingkungan, itu luar biasa sekali partisipasinya. Memang modal sosial ini harus terus kita dorong sehingga programnya makin besar makin besar dan akhirnya bisa diikuti oleh lebih banyak peserta.

Sampah di kebanyakan tempat di Indonesia 80% sumbernya dari darat. Itu berarti datangnya dari sungai begitu ya. Kalau di Jakarta itu sumbernya dari rumah tangga atau perusahaan?

Ini ada yang menarik bahwa misalnya sampah itu yang terkumpul dan terkelola dengan baik itu kurang lebih hanya 39% secara nasional. Jakarta mungkin lebih baik, lebih tinggi, karena trennya, kota besar itu lebih baik pengelolaan sampahnya dibandingkan dengan kota kecil. Karena sistemnya lebih baik lah. Pemerintah daerah punya dana yang lebih besar dan itu bisa mengelola sampah. Meskipun timbunannya lebih banyak, tetapi kemampuan untuk pengelolaannya lebih baik. Meskipun itu belum baik baik sekali. Contoh kasus Jakarta, terkumpul dan terangkut ke Bantar Gebang. Di Bantar Gebang juga kan belum dimanfaatkan secara optimal. Hanya di *landfill* atau *sanitary landfill*. Tapi secara nasional memang itu hanya 61% yang terkumpul dengan baik. Mulai dari rumah. Nah, 24% nya oleh pengumpulan formal, tadi yang diangkut oleh Dinas Kebersihan misalnya. Dari 61 yang tidak terkumpul itu sebagian ada yang dibakar, ada yang *leakage* tadi ya, dan ujungnya akan bocor ke laut. Nah, sumbernya dari mana? Sumber utama adalah, dari yang tidak terkumpul. Orang kan bisa saja membuangnya tidak ke sungai, tapi ke lingkungan, ada banyak tuh tempat sampah-tempat sampah ilegal, di pekarangan, di kebun, segala macam, itu kita anggap sebagai tidak terkumpul sebenarnya. Nah makanya pada saat musim tertentu akan turun ke sungai dan akhirnya ke laut. Itu sumber yang paling utama, *leakage* tadi. Kalau untuk yang dimaksud *point source*, dalam konteks sampah mungkin tidak ada, karena aturannya kan tidak boleh ada

leakage. Jadi yang *non point source* ini yang akan bocor ke lingkungan. Jadi yang bocor ke lingkungan itu 9-10%. Sampah yang bocor langsung ke sungai dan ke laut itu kurang lebih. Sisanya dari berbagai kegiatan itu, mungkin totalnya 20% lah yang masuk ke laut dari aktivitas di darat.

Partisipasi sosial itu kan bentuknya ada beberapa macam, kalau misalnya untuk masyarakat Jakarta sendiri untuk partisipasi sosial dalam bentuk donasi uang bagaimana? Untuk penanganan sampah ini?

Saya belum melihat format donasi yang berbentuk individual, mungkin ada, tapi kecil. Yang ada mungkin dari *corporate*, dari perusahaan, untuk CSR, misalnya. Dari CSR banyak. Misalnya kemarin yang saya ikuti di Jakarta ada INAPLAS ya, Candra Asri, ada kampung yang memang dibina sehingga dia bebas sampah plastik, begitu. Mulai pengumpulan dari rumah, segala macam, sampai di situ ada pemilahan dan daur ulang. Itu kerjasama atau dukungan dari swasta. Saya belum tahu kalau ada yang sifatnya individual, tetapi sebetulnya ada potensi besar dana masyarakat itu dari retribusi. Dan ini saya belum tahu, misalnya kita di lingkungan di RT mungkin ada retribusi sampah gitu. Tetapi itu kan belum, *accountability*-nya lah. *Accountability*nya belum jelas, uang kita tuh larinya ke mana sih sebenarnya? Karena layanan persampahan itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, Pemda juga menggelontorkan dana cukup besar untuk pengumpulan dan pengangkutan sampai dibawa ke TPA, dalam konteks Jakarta. Kemudian kita juga, sebagai warga kan membayar gitu. Tapi besaran bayaran kita itu kan tidak jelas. Yang menentukan juga di tingkat warga saja. Belum ada misalnya secara formal pemerintah mengeluarkan retribusi persampahan misalnya. Saya belum tahu, tapi sebagian besar begitu. Nah, untuk itu, kami di pemerintah mengkoordinasikan saat ini untuk membuat Permendagri tentang retribusi dan penghitungan retribusi sampah di kota berbagai daerah. Itu nanti akan dipilah kota mana yang, kota besar, atau kemampuan fiskal daerahnya baik atau rendah, nanti akan ada perhitungannya sehingga jadi rujukan pemerintah daerah untuk menetapkan besaran retribusi persampahan. Jadi nanti masyarakat itu sama seperti kita bayar listrik gitu, bayar listrik kita bayar berapa, uangnya lari ke mana, gitu. Kalau sampah yang sekarang belum jelas. Kita bayarnya ke siapa, apakah itu dipakai untuk mengelola sampah kita, kita belum tahu. Dan seberapa besar sebetulnya harus kita bayar. Itu belum ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, akan ada keluar tentang Permendagri tentang penghitungan retribusi ini dan nanti bisa jadi rujukan Pemerintah Daerah. Sekarang belum ada, sehingga besaran potensi retribusi itu belum seragam, sehingga Pemerintah Daerah pun menghitungnya sendiri-sendiri. Tidak ada standar. Ini terjadi di mana-mana. Kita tidak merasa bertanggung jawab untuk mengelola sampah kita. Yang penting saya sudah taruh di depan rumah kita. Nanti diambil oleh Dinas kebersihan. Tapi Pemerintah Daerah juga hampir di mana-mana mengalami kekurangan kemampuan untuk mengelola sampah itu, karena tadi, sumber dananya kecil. Misalnya, budget untuk mengelola sampah itu kecil sekali, APBD-nya itu rata-rata di bawah satu persen, sampai hanya dua persen di beberapa, di kota

besar mungkin sampai dua persen. Dari APBD ya. Misalnya di, kan ada Undang-Undang yang tentang pendidikan, di mana APBD itu minimal 20%, atau APBN minimal 20% untuk Pendidikan gitu misalnya. Nah untuk persampahan atau lingkungan ini belum ada. Nah beberapa survey memperlihatkan bahwa APBD di satu daerah itu kecil sekali. Ada yang 0,5% dari APBD-nya untuk mengelola sampah. Ada yang lebih baik, mungkin sekitar 2%. Bisa dibayangkan, dengan 2% anggaran tadi dia tidak akan mampu untuk mengelola sampah secara keseluruhan di daerah tersebut. Ini tantangan, sehingga nanti, tadi, adanya retribusi ini atau meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar ini, kalau meningkat, artinya Pemerintah Daerah punya sumber pendanaan gitu, sumber pendanaan untuk mengelola sampah. Sehingga nanti pelayanan persampahan pun akan jadi lebih baik. Begitulah konsepnya.

Pertanyaan Penelitian 2

Bagaimana regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta terkait dengan penanganan sampah plastik yang ada di Teluk Jakarta?

Jika memang sudah, kalau dari Pemerintah sendiri bagaimana Pemerintah itu menanggapi rasa peduli itu dengan program? Kalau dari Kemenkomarves sendiri itu kan sebenarnya sudah ada Rencana Aksi Nasional yang dari tahun 2018-2025. Itu bagaimana? Cara Pemerintah mengolah kesadaran itu menjadi aksi?

Menurut saya ini tantangan untuk kita semua ya, pemerintah, Pemerintah Daerah, juga kita semua sebagai masyarakat. Pemerintah itu sudah banyak juga program-program yang diarahkan untuk tadi ya, untuk merubah paradigma atau perilaku masyarakat. Misalnya, kami secara nasional punya Gerakan Indonesia Bersih. Gerakan Indonesia Bersih ini merupakan salah satu program yang digagas oleh Pak Presiden Jokowi pada saat bicara mengenai Revolusi Mental. Ada Inpres tentang Revolusi Mental. Di situ ada lima gerakan dalam konteks Revolusi Mental itu, salah satunya adalah Indonesia Bersih. Gerakan ini bertujuan untuk, satu, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebersihan, terutama dari sampah ya, ada masyarakat umum, ada Pemerintah, masyarakat dan Pemerintah utamanya. Untuk bisa memahami, kemudian melakukan perubahan mental. Perubahan perilaku nantinya supaya bisa hidup lebih bersih dan lebih sehat. Itu ada di dalam gerakan Revolusi Mental. Khususnya di Gerakan Indonesia Bersih. Itu satu. Kedua, tadi ada mbak khurin sebutkan perpres, perpres itu, ada dua perpres yang bisa kita rujuk, satu Perpres 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik Domestik. Di situ ada target nasional pengurangan sampah ya, pengurangan sampah 30% dan penanganannya 70% sampai dengan tahun 2025. Di situ terlihat peran-peran Pemerintah Daerah dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada juga Perpres 23 tahun 2018, itu tentang Penanganan Sampah Laut, sampah plastik laut, itu juga isunya memang sampah plastik di laut, tetapi kita ketahui bahwa sampah plastik laut itu asalnya dari darat, 80% itu dari darat. Itu *leakage* istilahnya, kebocoran ke lingkungan, melalui sungai, akhirnya ujungnya ke laut. Di situ ada lima strategi untuk mengurangi sampah laut. Salah satunya

adalah perubahan perilaku masyarakat. Ini didorong juga, perubahan perilaku itu, di situ juga ada Pokjanya yang Pokja perubahan perilaku di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, pemerintah sebetulnya sudah banyak program untuk bagaimana melibatkan masyarakat atau merubah perilaku masyarakat supaya pertama mengurangi sampah, kedua, bisa berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara lebih luas. Itu salah satu yang, banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sejenis yang juga didorong oleh pemerintah.

Bagaimana pelaksanaan dari program-program yang berusaha untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu, bagaimana programnya, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi?

Sebetulnya, kita sangat perlu *champion-champion*, atau orang-orang yang punya semangat, baik individual maupun komunitas untuk mendorong masyarakat secara luas, dalam aksi-aksi, tau *public figure* gitu ya. Yang bisa menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat. Dengan demikian, sebetulnya sangat efektif menurut saya bisa mendorong perilaku yang lebih ramah terhadap sampah dan juga aktif terhadap pengelolaan sampah. Banyak sekali milenial-milenial sekarang yang terpetik berbisnis dalam konteks sampah plastik misalnya. Banyak sekali, bisa di-*trace*. Memang dalam skala yang lebih kecil, banyak inisiatif-inisiatif seperti itu di berbagai tempat, namun memang karena masyarakat kita ini kan luas, heterogen, dan termasuk latar belakang misalnya, mohon maaf ya, pendidikan, ekonomi, yang ininya jauh gitu, sehingga, memang tidak sama, strategi itu berlaku untuk semua level itu gitu. Jadi, perlu memang strategi-strategi yang beragam untuk bisa menyasar golongan masyarakat tertentu atau usia tertentu. Saya kira perlu untuk semakin ditingkatkan ke depan.

Jadi sampah walaupun merugikan, berpotensi bisa menghasilkan uang, Apakah Pemerintah sudah memiliki program yang melibatkan *circular economy* terkait pengolahan sampah sehingga partisipasi masyarakat meningkat?

Setuju. Masyarakat ini harus disadarkan bahwa ada manfaat ekonomi di sampah itu. Hampir semua jenis sampah bisa dimanfaatkan. Hanya kadang-kadang kita kan tidak terbiasa melakukan pemilahan, pengurangan, kemudian mungkin ada kesan bekerja di bidang persampahan itu tidak gengsi gitu lah, gengsinya tidak tinggi, sehingga orang mungkin memandang sebelah mata, padahal sebetulnya bisa dicek beberapa inisiatif atau *project* yang dilakukan oleh masyarakat menghasilkan uang cukup signifikan. Misalnya dari daur ulang plastik, atau misalnya sekarang limbah organik bisa dimanfaatkan sebagai, kalau dulu kan kompos, sekarang ada dengan budidaya *maggot* misalnya. Banyak yang bisa dimanfaatkan nilai ekonominya. Hanya memang itu tadi, masyarakat perlu didorong, diberikan bimbingan, pembinaan untuk bisa memanfaatkan sampah tersebut. Kalau bicara *circular economy* ya, kan memang harus *integrated*, dari hulu ke hilir, intinya kan *circular economy* itu bisa mendayagunakan sampah atau suatu barang dengan masa lebih lama lagi gitu. Misalnya kalau dari satu barang sudah tidak

terpakai bisa dipakai lagi menjadi barang yang lainnya. Kalau dulu kan, kalau ekonomi linier, itu ada sumberdaya, diproduksi, dipakai, sampah, gitu ya. Jadi ujungnya sampah. Nah, kalau *circular* itu, dari barang, kemudian dipakai, itu tidak jadi sampah, tapi bisa jadi di-*recycle*, didaur ulang, atau di-*redesign* menjadi barang baru lagi begitu. Terus berulang sampai nanti suatu hari barang tersebut sulit untuk dipakai ulang, begitu misalnya. Itu istilahnya kita sebut dengan residu. Itulah konsep-konsep *circular economy*.

Apakah pemerintah mempertimbangkan kerjasama dengan LSM dalam penanganan sampah?

Tentu. Bahkan dengan NGO-NGO, kita melibatkan mereka. Bahkan sekarang ada juga kesadaran dari pihak industri atau swasta untuk bisa mendorong perbaikan tentang masalah sampah ini sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Saya ambil contoh saja dari PRAISE, yakni kumpulan industriawan yang terkait dengan plastik. Ada Danon, Nestle, Indofood, Tetrapex, itu totalnya ada lima *brand*, mereka membuat PRAISE. Setelah itu mereka membuat program-program baik untuk memperbaiki kinerja di internal mereka, maupun nanti bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. Kami bekerjasama dengan PRAISE tersebut. juga misalnya dengan Danon, Aqua juga di PRAISE. Kita juga mendorong mereka untuk bisa membantu pengelolaan persampahan ini. Banyak contoh yang sudah kita kerjakan dengan mereka.

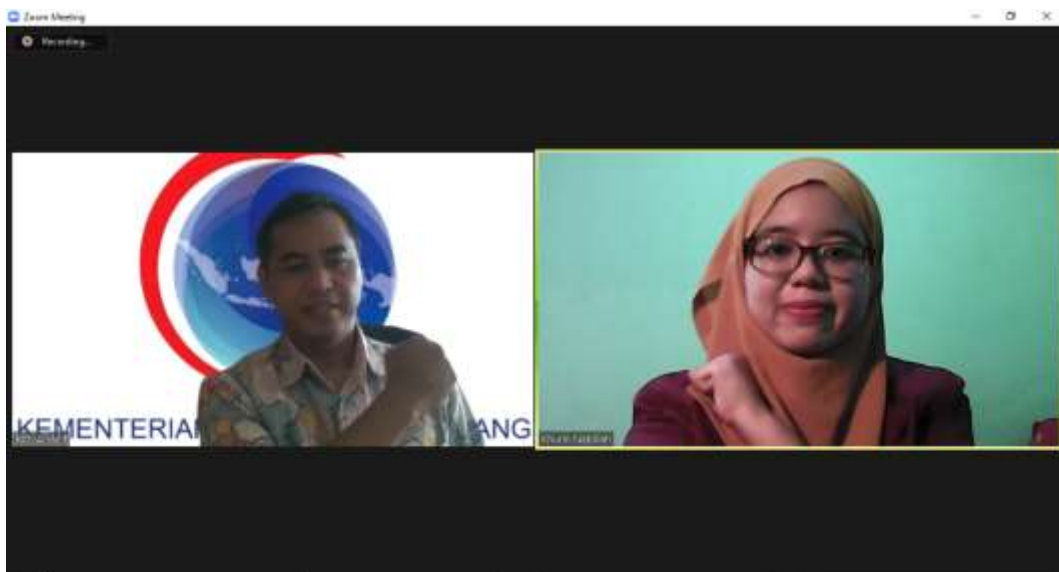
Kalau kerjasama dengan penanganan sampah itu bagaimana? Apakah ada?

Ada. Misalnya, Danon itu, dia komitmen untuk bisa mengumpulkan ulang plastik yang mereka produksi 100%. Targetnya itu sampai 2025 kalau tidak salah. Jadi nanti mereka itu bekerjasama dengan bank sampah, dengan TPST, melalui penguatan kapasitas, pendampingan, dan seterusnya. Bahkan seperti memperkuat komunitas pemulung, ada juga yang kita kerjakan dengan komunitas-komunitas dan perusahaan perusahaan swasta.

Untuk Rencana Aksi Nasional dari penanganan sampah laut yang tahun 2018-2025, itu ada lima strategi, yang pertama, ada gerakan nasional peningkatan kesadaran. Kalau dari bapak sendiri tadi sudah mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat sudah sadar, hanya saja aksinya itu yang masih belum optimal, begitu ya bapak? Lalu, karena aksinya belum optimal, pemerintah melaksanakan beberapa program, hasilnya masih belum optimal. Harapannya, supaya peningkatannya itu, kuncinya tadi Bapak bilang kan tadi ada pemanfaatan teknologi, penggerakan public figure, lalu selanjutnya kerjasama dengan institusi lain seperti perusahaan dan LSM begitu ya bapak.

Ya

LAMPIRAN 5 DOKUMEN PENDUKUNG



Dokumentasi Wawancara Bapak Rofi Alhanif



Dokumentasi Wawancara Bapak Dida Migfar



Dokumentasi Wawancara Bapak Djoko Rianto

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Khurin Nabillah, lahir di Kabupaten Lumajang pada tanggal 26 September 1994, Anak ke-1 dari pasangan Bapak Hendrawan Bayu Prewito dan Ibu Nyimas Emil Oeboedidjah Wathony. Jenjang Pendidikan dasar ia tempuh di tahun 2000 – 2006 dan menyelesaikan pendidikan SD Hang Tuah 6 Ciangsana lulus tahun 2006. Kemudian menempuh pendidikan menengah di SMP 230 Jakarta Timur (2007-2008) dan SMP 1 Tanjungpinang (2009) dan lulus tahun 2009, menempuh pendidikan menengah di SMA 1 Tanjungpinang (2010), SMA 17 Makassar (2010), dan SMA 1 Cileungsi (2011-2012), dan lulus di tahun 2012.

Peneliti menempuh pendidikan tinggi Sarjana (S-1) dengan program studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Padjadjaran selama lima tahun dan lulus di tahun 2017, dan pada tahun 2019 peneliti mendapat kesempatan menempuh kuliah program Magister (S-2) Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional di Universitas Pertahanan.